

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konpress, 2005.
- *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konpres, 2006.
- Atoshoki dkk, Antonius. *Relasi Dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
- Azikin, Zainal . *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hamaily Ibrahim, Moh. Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FH UI, 1985.
- Hukum Tatanegara Islam. *Modul Materi Ujian Komperhensif*. Cirebon, Hukum Tatanegara.
- Manan, Bagir. *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. dikutip dari Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta : FH UII Press, 2003.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Mashuriyanto, dan Soimin. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press 2013.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Kansil, C.S.T. & Christine S.T Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ridwan. *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Soehino. *Ilmu Negara Edisi Kedua*, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan-Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius, 2011.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Triwulan Tutik, Titik. *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2011.

B. Skripsi dan Jurnal Ilmiah

- Abdurahman, Ali. "Menempatkan Ketetapan MPR yang Masih Berlaku". *Jurnal Majelis, Biro Pengkaji, Sekertariat MPR RI*, Edisi 05/ (Tahun 2016).
- Absori, Widayati dan Aidul Fitriaciada Azhari, "Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan". *Jurnal Media Hukum*, 21:2 (Desember 2014).
- Febriansyah. S. "Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Sesudah Amandemen Keempat Undang – Undang Dasar 1945". *Skripsi*,

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Hady, Nuruddin. "Kedudukan TAP MPR pasca pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia". *Jurnal Majelis, Biro Pengkaji, Sekertariat MPR RI*, Edisi 05/ (Tahun 2016).

Hidayat, Taufik, M. Hari Wahyudi, dan Ahmad Labib. "Kedudukan TAP MPR Dalam Hierarki Perundang-Undangan Republik Indonesia". *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2014.

Ishak, Khairul. "Studi Komparatif Pergeseran Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Manan, Firman. "Urgensi Pengembalian Kewenangan Pembuatan Ketetapan MPR yang Berrsifat Mengatur". *Jurnal Majelis, Biro Pengkaji, Sekertariat MPR RI*, Edisi 05/ (Tahun 2016).

Prayudi. "MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politiknya". *Politica*, 3:1, Mei 2012.

Rafiudin. "Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang yang Diuji Lebih dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003- 2010)". *Tesis*, Fakultas Hukum UI Jakarta, 2012.

Rosadi, Otang. "Menempatkan Ketetapan MPR RI Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Majelis, Biro Pengkaji, Sekertariat MPR RI*, Edisi 05/ (Tahun 2016).

Rudin, Akmal. "Analisis Yuridis tentang Kembalinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Yuridis Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011)". *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

S. Attamimi, A. Hamid. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV”. *Disertas*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 1990.

Septiana, Winda. “Konstruksi Makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bagi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014)”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2014.

Tuwaitan, Ryando. “Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. *Lex Administratum*, 1:1 Jan-Mrt 2013.

Yusmiati. “Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. *Nusantara*, 4 Februari 2018.

C. Internet dan Risalah

Dunia, Ensiklopedia. “Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”, *Web. Stekom. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (stekom.ac.id)*. Diakses 2 Januari 2024.

Konstitusi, Mahkamah “Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi.” *Web. Mahkamah Konstitusi. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>*. Diakses 30 Januari 2023.

Puspitadewi, Rachmani. ”Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara di Indonesia berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”. *Blogspot. TAP MPR ; Ketetapan MPR (putierachmani.blogspot.com)*. Diakses 19 Maret 2024

Rakyat, Majelis Permusyawaratan. “Kedudukan, Tugas dan Wewenang”, *Web. MPR-RI*. <https://mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang#>, Diakses 11 & 30 Januari 2024.

Risalah pembahasan amandemen Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945.

Risalah pembahasan penyusunan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003.

Akta Pendirian Nomor 4 tentang Pembentukan dan Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang.

D. Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2023 tentang Peninjauan Kembali Materi Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 dicabut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/ MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dan untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dicabut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960

sampai dengan Tahun 2002, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b].

